

Dari Bandar ke Kesultanan: Transformasi Kota Dagang Menjadi Kerajaan Islam

Muhammad Farid Wajdi¹, Syahdino Sahdana², Susmihara³

Program Pascasarjana Dirasah Islamiyah Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia ^{1,2,3}

Corresponding Author: mfarid.wajdi@immimpangkep.ponpes.id^{*}, Nursyahdi4@gmail.com², susmihara@uin-alauddin.ac.id³

Info Artikel

Received: 20 Juni 2026

Revised : 06 Juli 2026

Accepted: 15 Juli 2026

Published: 24 Juli 2026

Keywords: port city, sultanate, transformation, trading city, Islam of the Archipelago.

Kata Kunci: bandar, kesultanan, transformasi, kota dagang, Islam Nusantara.

Abstract

The transformation of coastal regions in the Indonesian archipelago from trading ports (bandar) into centers of political power in the form of sultanates is one of the most crucial phenomena in the historiography of Islamization in Southeast Asia. This paper aims to analyze the mechanisms behind the structural transformation of trading cities into Islamic political entities (sultanates) and to identify the internal and external factors that drove this conversion. Using critical historical research methods including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography this study examines the sociopolitical and economic dynamics in several major trading ports such as Samudera Pasai, Malacca, Demak, and Banten. The research findings indicate that the transformation from trading port to sultanate did not occur instantaneously, but rather through a dialectical process involving the religious conversion of local rulers, the integration of Islamic law (sharia) into maritime and commercial law, and the establishment of a new political legitimacy grounded in Islamic cosmology. The presence of transnational Muslim communities (merchants, ulama, and Sufis) served as both economic catalysts and ideological agents. This process ultimately gave rise to a distinctive model of the Nusantara Islamic city, in which economic functions (markets and ports) were symmetrically integrated with the center of power (the palace/keraton) and the spiritual center (the grand mosque). This transformation not only altered the city's urban landscape but also reshaped its social structure and triggered global geopolitical shifts in the Strait of Malacca and the Java Sea during the 13th–16th centuries.

Abstrak

Transformasi kawasan pesisir di Nusantara dari pelabuhan dagang (bandar) menjadi pusat kekuasaan politik berupa kesultanan merupakan salah satu fenomena paling krusial dalam historiografi Islamisasi di Asia Tenggara. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perubahan struktural kota-kota dagang menjadi entitas politik Islam (kesultanan) serta mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong konversi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah kritis yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi penelitian ini mengkaji dinamika sosiopolitik dan ekonomi di beberapa bandar utama seperti Samudera Pasai, Malaka, Demak, dan Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi dari bandar menjadi kesultanan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses dialektika yang melibatkan

konversi agama para penguasa lokal, integrasi hukum Islam (syariat) dalam hukum laut dan perdagangan, serta pembentukan legitimasi politik baru yang berbasis kosmologi Islam. Kehadiran komunitas Muslim transnasional (pedagang, ulama, dan sufi) bertindak sebagai katalis ekonomi sekaligus agen ideologis. Proses ini pada akhirnya melahirkan model kota Islam Nusantara yang khas, di mana fungsi ekonomi (pasar dan pelabuhan) berpadu secara simetris dengan pusat kekuasaan (istana/keraton) dan pusat spiritual (masjid agung). Transformasi ini tidak hanya mengubah lanskap tata ruang kota, tetapi juga mereformasi struktur sosial dan memicu pergeseran geopolitik global di Selat Malaka dan Laut Jawa pada Abad XIII – XVI.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Sebelum kedatangan pengaruh Islam yang masif pada abad ke-13 Masehi, jaringan perdagangan di kepulauan Nusantara telah terbentuk dengan kokoh di bawah hegemoni imperium-imperium berbasis agrarian-maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit. Kota-kota di pesisir utara Sumatra, Selat Malaka, dan pantai utara Jawa berfungsi sebagai entrepôt atau bandar internasional yang menghubungkan jalur perdagangan jarak jauh (long-distance trade) antara dunia Barat (Eropa, Timur Tengah, India) dan dunia Timur (Tiongkok dan Jepang). Bandar-bandar ini pada mulanya merupakan kawasan kosmopolitan yang longgar secara politik, di mana para syahbandar (pengawas pelabuhan) ditunjuk oleh otoritas kerajaan pedalaman untuk mengelola retribusi dan menjaga stabilitas pasar. Kehidupan di bandar digerakkan oleh pragmatisme ekonomi, di mana berbagai etnis, budaya, dan agama saling berinteraksi tanpa adanya pemaksaan ideologis yang ketat dari penguasa setempat.

Namun, memasuki akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, lanskap sosiopolitik kawasan pesisir ini mengalami pergeseran radikal. Bandar-bandar dagang yang semula hanya berfungsi sebagai titik transit komoditas mulai melepaskan diri dari patronase kerajaan pedalaman yang berberbasis Hindu-Buddha. Proses emansipasi politik ini berjalan beriringan dengan intensifikasi proses Islamisasi. Para penguasa lokal (keplal pelabuhan atau datu) mulai memeluk agama Islam, sebuah keputusan strategis yang segera diikuti oleh transformasi institusional secara menyeluruh. Bandar-bandar tersebut bermutasi menjadi kesultanan sebuah entitas politik berdaulat yang mengadopsi sistem teokrasi-monarki Islam, di mana Sultan tidak hanya bertindak sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai Zilullah fil-Alam (Bayang-bayang Allah di Mumi) atau Khalifatullah (Wakil Allah).

Transformasi dari bandar menjadi kesultanan ini menarik perhatian besar dalam studi sejarah

maritim dan keagamaan. Perubahan ini bukan sekadar pergantian gelar dari "Raja" menjadi "Sultan", melainkan sebuah perombakan struktural pada sistem hukum, struktur sosial, organisasi militer, hingga tata ruang kota. Hukum-hukum adat yang bias lokal mulai digantikan atau disinkretiskan dengan Fikih (hukum Islam), seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Melaka atau Undang-Undang Laut Melaka. Pasar tidak lagi hanya diatur oleh kesepakatan dagang purba, melainkan mulai diawasi oleh lembaga Hisbah untuk mencegah praktik ribawi dan kecurangan takaran.

Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar mengenai kausalitas sejarah: Bagaimana mungkin sebuah komunitas pelabuhan yang berkarakter cair, heterogen, dan materialistik dapat mengonsolidasikan diri menjadi sebuah pusat kekuasaan politik-keagamaan yang rigid dan ekspansif? Teori-teori Islamisasi konvensional sering kali terjebak pada dikotomi antara jalur perdagangan yang damai (*conversion from top*) dan jalur penaklukan militer (*conversion from bottom*). Terdapat kekosongan analisis yang menjembatani aspek ekonomi murni dari sebuah bandar dengan aspek teologis-politis dari sebuah kesultanan. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai dinamika spasial, institusional, dan sosiologis dari perubahan "Bandar ke Kesultanan" ini menjadi sangat krusial untuk membongkar akar historis pembentukan peradaban Islam di Nusantara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian dan Desain Pendekatan Interdisipliner

Penelitian mengenai transformasi bandar dagang menjadi Kesultanan Islam di Nusantara ini dirancang menggunakan pendekatan penelitian sejarah kritis (*critical historical research method*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berpusat pada rekonstruksi peristiwa, perubahan struktural, dan dinamika sosial-politik masa lampau yang terjadi pada kurun abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Metode sejarah tidak sekadar bertujuan untuk memaparkan urutan kronologis kejadian (*what happened*), melainkan berupaya membongkar kausalitas mendalam, motif para aktor sejarah, serta perubahan makro secara institusional (*why and how it happened*).

Mengingat kompleksitas objek kajian yang melibatkan aspek ruang (geografis-maritim), ekonomi (jaringan pasar transnasional), dan teologis (proses konversi agama), penelitian sejarah konvensional yang bersifat naratif tunggal dipandang tidak lagi memadai. Oleh sebab itu, desain penelitian ini diperkaya dengan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*), dengan meminjam konsep-konsep dari tiga cabang ilmu bantu sosial-humaniora:

Sosiologi Makro-Ekonomi: Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana aktivitas ekonomi di pelabuhan (bandar) mempengaruhi akumulasi kapital yang pada gilirannya mendorong

terjadinya diferensiasi sosial, pembentukan kelas baru (borjuasi Muslim/pedagang kaya), serta runtuhnya sistem patronase feudal-agrarian warisan masa Hindu-Buddha.

Tahapan Penelitian Sejarah

Operasionalisasi penelitian ini mengikuti empat pilar utama dalam metode sejarah yang baku, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi keaslian dan kredibilitas), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan sejarah).

1. Tahapan Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik merupakan langkah awal yang krusial untuk melacak dan mengumpulkan jejak-jejak masa lampau yang relevan. Karena fokus kajian adalah bandar dan kesultanan pada abad ke-13 hingga ke-16, pengumpulan data dihadapkan pada tantangan keberagaman corak sumber. Sumber yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama:

Sumber Tertulis Lokal (Kesusastraan Sejarah): Sumber ini mencakup kronik, hikayat, dan babad yang ditulis oleh pujangga atau ulama keraton pasca-Islamisasi. Dokumen penting yang diburu antara lain Hikayat Raja-Raja Pasai (untuk melacak bandar Pasai), Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu (untuk menganalisis transisi Malaka), Babad Tanah Jawi dan Sajarah Banten (untuk merekonstruksi Islamisasi bandar-bandar di Laut Jawa). Sumber lokal ini kaya akan gambaran internal mengenai legitimasi politik sultan dan hukum adat pelabuhan.

Sumber Kebudayaan Materiil (Arkeologis): Data ini dikumpulkan melalui studi literatur atas laporan-laporan ekskavasi arkeologis di situs pesisir. Termasuk di dalamnya adalah epigrafi (seperti Batu Bersurat Terengganu dan nisan Sultan Malik al-Saleh), numismatik (koin dirham Pasai dan koin caxa Banten), serta sisa-sisa arsitektur pertahanan (temenggung atau benteng tanah).

2. Tahapan Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah sumber-sumber terkumpul, peneliti melakukan pengujian ketat melalui dua tahap verifikasi untuk memastikan data yang digunakan valid dan bebas dari distorsi interpretasi.

a. Kritik Eksternal (Uji Otentisitas)

Tahap ini menguji keaslian fisik sumber. Untuk naskah lama seperti hikayat atau babad, kritik eksternal dilakukan dengan meneliti usia kertas atau salinan manuskrip (karena mayoritas naskah lokal yang tersisa merupakan salinan abad ke-18 atau ke-19). Peneliti membandingkan variasi teks untuk menemukan archetype (teks tertua). Terhadap koin dan nisan, kritik eksternal bertumpu pada analisis epigrafi, gaya pahatan, dan metalurgi untuk memastikan benda tersebut bukan replika modern.

b. Kritik Internal (Uji Kredibilitas)

Tahap ini menguji isi teks atau narasi sejarah. Peneliti menyadari adanya bias ideologis yang kuat pada sumber lokal (babad/hikayat) yang sering kali membungkus peristiwa konversi agama para raja dengan unsur mitologis atau supranatural (seperti mimpi bertemu Nabi) demi melegitimasi kekuasaan Sultan. Untuk itu, teknik cross-examination (saksi silang) diterapkan. Narasi mitologis dalam Hikayat Raja-Raja Pasai disaring dengan mencocokkannya dengan deskripsi geografis dan politik rasional dari Ibnu Battuta. Demikian pula, klaim kebesaran ekonomi Demak dalam Babad Tanah Jawi dikonfrontasi dengan laporan ekonomi Tomé Pires yang mencatat kapasitas produksi beras dan jumlah jung militer yang dimiliki bandar tersebut.

3. Tahapan Interpretasi (Analisis dan Sintesis)

Tahap interpretasi adalah proses merangkai fakta-fakta sejarah yang telah lolos verifikasi menjadi satu kesatuan yang logis dan bermakna. Proses interpretasi dalam penelitian ini dilakukan melalui dua penalaran, yaitu

a. Penalaran Analisis (Mengurai)

Fakta sejarah diurai berdasarkan dimensi spasial dan temporalnya. Peneliti memisahkan data-data yang murni bersifat ekonomi (seperti volume perdagangan maritim, jalur rempah) dari data yang bersifat superstruktur politik (seperti maklumat sultan, adopsi gelar keagamaan). Peneliti menganalisis bagaimana relasi kuasa bergeser ketika para pedagang Muslim kaya mulai mendapatkan posisi strategis sebagai Syahbandar di pelabuhan milik kerajaan Hindu.

b. Penalaran Sintesis (Menyatukan)

Serpihan fakta yang telah dianalisis disatukan kembali menggunakan pisau teori sosiologi sejarah. Peneliti mengaitkan antara pertumbuhan ekonomi bandar dengan kebutuhan akan kepastian hukum universal. Di sinilah sintesis dilakukan: ketika hukum adat lokal tidak lagi mampu menyelesaikan sengketa antara pedagang Gujarat, Tionghoa, dan lokal, hukum Islam (Fikih dagang) hadir sebagai solusi hukum transnasional yang menyatukan mereka di bawah panji Kesultanan. Dengan demikian, transisi politik dibaca bukan sebagai kebetulan spiritual semata, melainkan sebagai respons adaptif atas tuntutan globalisasi maritim pada masanya.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan fase pamungkas di mana seluruh hasil analisis dan sintesis dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis, runtut, dan objektif. Penulisan makalah ini menggunakan metode pemaparan Naratif-Analitis. Artinya, tulisan tidak hanya menyajikan kisah kronologis yang deskriptif mengenai berdirinya kesultanan-kesultanan Islam, tetapi secara konsisten

menyisipkan analisis kritis di setiap transisi babak sejarah. Penulisan diorganisasikan secara tematis-kronologis untuk mempermudah pembaca menangkap dinamika perubahan dari fungsi ruang yang semula profan (bandar dagang) menuju ruang yang sakral sekaligus politis (kesultanan).

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk mencegah meluasnya pembahasan dan menjaga fokus analisis, peneliti menetapkan batasan penelitian yang jelas, yang terbagi atas batasan spasial (geografis) dan batasan temporal (waktu).

Batasan Spasial: Penelitian ini membatasi ruang kajiannya pada wilayah pesisir utama di Nusantara yang berada di jalur sutra maritim (the maritime silk road). Wilayah tersebut diwakili oleh tiga zona bandar-kesultanan utama:

1. Zona Selat Malaka (diwakili oleh Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Malaka) sebagai pintu gerbang masuknya arus perdagangan barat.
2. Zona Pantai Utara Jawa (diwakili oleh Kesultanan Demak) sebagai pusat agraris-maritim yang meruntuhkan hegemoni Majapahit.
3. Zona Selat Sunda (diwakili oleh Kesultanan Banten) sebagai bandar lada internasional yang muncul di masa transisi akhir.

Batasan Temporal: Batasan waktu dalam penelitian ini ditetapkan berkisar antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Titik awal (abad ke-13 M) diambil berdasarkan bukti-bukti arkeologis konkrit pertama mengenai berdirinya entitas politik Islam tertua di Nusantara, yakni nisan Sultan Malik al-Saleh dari Samudera Pasai bertarikh 1297 M. Sementara titik akhir (abad ke-16 M) dipilih karena pada masa ini model Kesultanan Islam Maritim telah mencapai puncak kematangannya secara institusional, sebelum akhirnya mengalami benturan budaya dan penetrasi politik yang merusak dari kongsi dagang Eropa (seperti VOC) pada awal abad ke-17.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan Studi Pustaka (Library Research) dan studi dokumen. Peneliti tidak melakukan observasi lapangan secara langsung untuk menguji variabel sosial kontemporer, melainkan bekerja di perpustakaan, pusat arsip, dan database digital jurnal ilmiah sejarah untuk menelaah dokumen primer cetak (berupa terjemahan naskah kuno) serta literatur sekunder yang otoritatif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik Analisis Konten (Content Analysis) dan Analisis Komparatif (Comparative Analysis). Melalui analisis konten, peneliti membedah secara

mendalam makna implisit di balik teks hukum kuno seperti Undang-Undang Melaka. Peneliti melihat bagaimana aturan-aturan niaga diadaptasi dari mazhab Syafii.

Sementara itu, melalui analisis komparatif, peneliti membandingkan pola transformasi antara satu bandar dengan bandar lainnya. Sebagai contoh, dianalisis apakah transformasi Malaka menjadi kesultanan didorong oleh motif eksternal yang mirip dengan Demak, atau terdapat variasi sosiologis di mana Demak lebih dipengaruhi oleh aliansi keagamaan para Wali (Walisongo) sementara Malaka lebih didorong oleh kebutuhan proteksi politik dari dinasti Ming terhadap ancaman Siam. Analisis komparatif ini penting untuk menghasilkan kesimpulan yang general namun tetap menghormati keunikan lokal (local genius) dari masing-masing kota dagang di Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi Bandar Pesisir Sebelum Islamisasi: Karakteristik Ruang Cair dan Pragmatisme Ekonomi

Sebelum abad ke-13 Masehi, jaringan maritim di kawasan barat Nusantara dikuasai oleh suprastruktur maritim Hindu-Buddha, terutama imperium Sriwijaya dan kemudian disusul oleh Majapahit. Bandar-bandar pesisir pada era ini berkembang sebagai ruang urban yang sekuler, profan, dan sangat pragmatis. Secara morfologis, kota pelabuhan awal ini dicirikan oleh struktur sosial yang heterogen dan cair, di mana pemukiman penduduk dibagi berdasarkan etnisitas dan asal geokultural pedagang (kampung) guna mempermudah administrasi pelabuhan oleh seorang Syahbandar¹. Kedudukan bandar pada masa praruntuhnya hegemoni pedalaman diposisikan sebagai vasal atau bawahan yang berkewajiban menyettor upeti berupa surplus perdagangan maritim kepada raja pedalaman².

Secara spasial, tata ruang kota niaga pra-Islam belum memiliki integrasi ideologis yang kokoh. Ruang pasar di dekat dermaga bertindak sebagai jantung aktivitas kota, sedangkan pusat pemerintahan lokal berjarak relatif terpisah dan tidak menjadi representasi kosmik agama tertentu bagi masyarakat urban cosmopolitan³. Para pedagang dari Gujarat, Persia, Tiongkok, dan Arabia berinteraksi dalam batas-batas hukum adat pelabuhan lokal yang longgar. Kepentingan utama yang mengikat heterogenitas sosial ini adalah kelancaran arus barang seperti sutra, keramik, wewangian, dan rempah-rempah serta jaminan keamanan navigasi di perairan sekitar selat⁴. Pragmatisme pasar

¹ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin*, Jilid 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 120.

² Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, Jilid 1 (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 45.

³ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jilid 2: *Jaringan Asia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 78.

⁴ O.W. Wolters, *Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Srivijaya* (Ithaca: Cornell University Press, 1967), hlm. 56.

inilah yang pada akhirnya menjadi celah masuknya ide-ide keagamaan baru, di mana Islam tidak diperkenalkan melalui pemaksaan struktur teokratis, melainkan menyusup melalui jejaring transaksi ekonomi harian yang setara⁵.

Mekanisme Transformasi: Dari Konversi Aktor hingga Institusionalisasi Syariat

Proses mutasi dari sebuah pelabuhan dagang kosmopolitan menjadi entitas kesultanan berdaulat didorong oleh perpaduan dialektis antara faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, keruntuhan bertahap kekuasaan maritim Majapahit di Jawa dan pergeseran geopolitik global akibat jatuhnya Bagdad pada 1258 M memicu migrasi besar-besaran para ulama, sufi, dan pedagang Muslim transnasional menuju Asia Tenggara⁶. Komunitas Muslim ini membawa modal finansial yang besar sekaligus sistem aksara (Arab-Melayu) dan administrasi modern. Secara internal, para penguasa pelabuhan lokal (datu atau kepala daerah pesisir) melihat Islam sebagai instrumen ideologis yang kuat untuk membebaskan diri dari belenggu politik dan kewajiban upeti terhadap kerajaan pedalaman Hindu-Buddha yang mulai melemah⁷.

Mekanisme peralihan ini umumnya diawali oleh conversion from top, yakni konversi agama yang dilakukan oleh elite penguasa bandar demi kepentingan aliansi dagang dan penguatan legitimasi politik⁸. Ketika penguasa bandar memeluk Islam, gelar kebangsawanan lama yang bercorak konsep Dewa-Raja atau Bodhisatwa segera ditinggalkan dan digantikan dengan gelar keagamaan Islam seperti Sultan atau Zilullah fil-Alam⁹. Contoh paling otentik dari pola ini adalah konversi Merah Silu menjadi Sultan Malik al-Saleh di Samudera Pasai pada akhir abad ke-13 M, yang kemudian tercatat sebagai fajar politik Islam di Nusantara¹⁰.

Pasca-konversi elite, langkah strategis berikutnya adalah institusionalisasi hukum Islam (syariat) ke dalam struktur formal negara. Hukum niaga Islam (Fikih Muamalah) diadopsi untuk menggantikan hukum adat purba yang tidak lagi mampu memfasilitasi sengketa dagang lintas bangsa di pelabuhan besar. Fenomena ini terdokumentasi dengan jelas dalam pembentukan Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka pada masa kejayaan Kesultanan Malaka¹¹. Di dalam kodifikasi hukum tersebut, diperkenalkan jabatan Qadhi (hakim agama) yang bertugas mendampingi

⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 34.

⁶ T.W. Arnold, *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith* (London: Constable & Company, 1913), hlm. 367.

⁷ J.C. van Leur, *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History* (The Hague: W. van Hoeve, 1955), hlm. 112.

⁸ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu* (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1972), hlm. 45.

⁹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 23.

¹⁰ Teuku Ibrahim Alfian, *Kronika Pasai: Sebuah Tinjauan Sejarah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973), hlm. 89.

¹¹ Liaw Yock Fang, *Undang-Undang Melaka: The Laws of Melaka* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1976), hlm. 14.

Sultan dan Syahbandar dalam menyelesaikan perkara perdata, pernikahan, hingga regulasi transaksi pasar yang bebas dari praktik ribawi serta penipuan takaran¹². Standardisasi hukum berbasis Islam inilah yang memberikan kepastian hukum internasional, sehingga bandar-kesultanan tersebut tumbuh menjadi magnet perdagangan dunia yang aman dan terpercaya¹³.

Studi Kasus Episentrum Islamisasi Maritim Nusantara

1. Poros Selat Malaka: Samudera Pasai dan Malaka

Samudera Pasai bertindak sebagai laboratorium pertama transformasi politik Islam di Nusantara. Terletak di ujung utara Sumatra, Pasai awalnya merupakan gabungan dua bandar kecil, Samudera dan Pasai, yang dihuni oleh komunitas Muslim asing sejak abad ke-11¹⁴. Keberhasilan transisi Pasai menjadi kesultanan dipicu oleh kemampuannya menstandarisasi mata uang dirham emas (kupang) untuk perdagangan internasional¹⁵. Ibnu Battuta, dalam catatan perjalanannya tahun 1345 M, menggambarkan Pasai sebagai kota pelabuhan yang sangat besar dan makmur, dipimpin oleh seorang Sultan yang taat pada mazhab Syafii dan gemar berdiskusi dengan para teolog internasional¹⁶.

Ketika Malaka muncul pada awal abad ke-15 M di bawah kepemimpinan Parameswara (yang kemudian bergelar Sultan Iskandar Syah), mereka meniru cetak biru kosmopolitan Pasai. Malaka melangkah lebih jauh dengan membangun birokrasi maritim yang sangat rapi¹⁷. Transformasi Malaka menjadi sebuah megapolit maritim didukung penuh oleh aliansi strategis dengan Laksamana Cheng Ho dari Dinasti Ming Tiongkok, yang memberikan perlindungan militer bagi Malaka dari agresi Siam dan Majapahit¹⁸. Menurut laporan Tomé Pires dalam *Suma Oriental*, kebesaran Malaka bersumber pada integrasi sempurna antara kendali politik selat dan pengelolaan empat Syahbandar yang mengurus berbagai kelompok etnis pedagang di pelabuhan tersebut¹⁹.

2. Poros Laut Jawa: Demak, Tuban, dan Banten

¹² Uka Tjandrasmita, *Arkeologi Islam Nusantara* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), hlm. 154.

¹³ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global*, Jilid 2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 202.

¹⁴ Kenneth R. Hall, *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2011), hlm. 280.

¹⁵ H.J. de Graaf dan T.G.Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hlm. 12.

¹⁶ Ibn Battuta, *The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325-1354*, Vol. 4, terj. H.A.R. Gibb (London: The Hakluyt Society, 1994), hlm. 876.

¹⁷ Wang Gungwu, *The First Three Rulers of Malacca*, dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 41, No. 1, 1968, hlm. 18.

¹⁸ Ma Huan, *Ying-yai Sheng-lan: 'The Overall Survey of the Ocean's Shores' (1433)*, terj. J.V.G. Mills (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), hlm. 115.

¹⁹ Tomé Pires, *The Suma Oriental of Tomé Pires: An Account of the East, from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515*, Jilid 1 (London: The Hakluyt Society, 1944), hlm. 268.

Di pantai utara Jawa, proses metamorfosis bandar menjadi kesultanan memiliki dinamika unik karena keterkaitannya yang erat dengan jaringan dakwah mistik-sufistik Walisongo. Demak, yang awalnya merupakan sebuah hutan glagah bernama Bintoro yang berada di bawah kekuasaan Majapahit, bermutasi menjadi kesultanan Islam pertama di Jawa pada akhir abad ke-15 di bawah pimpinan Raden Patah²⁰. Faktor penggerak utama Demak adalah akumulasi kapital dari perdagangan beras dan kayu jati yang dialirkan melalui bandar-bandar satelitnya seperti Tuban, Jepara, dan Sedayu²¹.

Transformasi Demak tidak sekadar mengubah status politiknya, tetapi juga merombak total geopolitik Laut Jawa. Aliansi militer Demak di bawah pimpinan Pati Unus melakukan ekspansi ke Malaka (1513) dan menghancurkan sisa-sisa pelabuhan Hindu purba²². Sementara itu, di ujung barat Jawa, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten pasca-penaklukan bandar Sunda Kelapa dan Banten Girang milik Kerajaan Sunda pada 1526 M²³. Banten segera menjelma menjadi kota metropolitan Islam yang mandiri, memanfaatkan Selat Sunda sebagai jalur alternatif perdagangan lada dunia setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 M²⁴.

3. Morfologi Kota Islam Nusantara: Tata Ruang Baru dan Simbolisme Kosmologis

Salah satu dampak paling nyata dari transformasi dari bandar menjadi kesultanan tercermin pada perubahan fisik tata ruang urban, yang dalam studi sejarah urban dikenal dengan sebutan Kota Islam Nusantara²⁵. Jika tata ruang bandar pra-Islam berkarakter acak dan bertumpu pada ego pasar, maka kota kesultanan mengadopsi struktur ruang trilogi simetris yang mencerminkan perpaduan harmoni antara urusan duniawi (ekonomi), kekuasaan (politik), dan ukhrawi (spiritual)²⁶.

Poros tata ruang kota kesultanan selalu menempatkan Alun-Alun sebagai titik pusat axial ruang terbuka hijau²⁷. Di sebelah selatan alun-alun, dibangun Keraton atau Istana Sultan sebagai simbol kekuasaan politik dan administrasi negara. Di sebelah barat alun-alun, didirikan Masjid Agung lengkap dengan menara dan atap tumpang bertingkat sebagai representasi spiritualitas Islam yang telah berakulturasi dengan estetika lokal²⁸. Sementara itu, Pasar dan Pelabuhan diposisikan di sebelah

²⁰ Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara* (Jakarta: Bhratara, 1968), hlm. 94.

²¹ H.J. de Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1986), hlm. 41.

²² Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara: A History of Indonesia* (The Hague: W. van Hoeve, 1965), hlm. 84.

²³ Claude Guillot, *The Sultanate of Banten* (Jakarta: Gramedia Book Publishing Division, 1990), hlm. 33.

²⁴ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologi dan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 119.

²⁵ Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi* (Singapore: Heinemann, 1979), hlm. 6.

²⁶ Uka Tjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad ke-13 M sampai Abad ke-18 M* (Kudus: Menara Kudus, 2000), hlm. 47.

²⁷ Peter J.M. Nas, *The Indonesian Town Revisited* (Münster: LIT Verlag, 2002), hlm. 93.

²⁸ G.F. Pijper, *Studien over de Geschiedenis van de Islam in Nederlansch-Indië* (Leiden: E.J. Brill, 1934), hlm. 22.

utara atau timur, dekat dengan akses air²⁹.

Konfigurasi tata ruang ini membuktikan bahwa Islamisasi di Nusantara tidak menghapuskan fungsi ekonomi dari sebuah bandar, melainkan mendisiplinkan ruang ekonomi tersebut di bawah payung moral keagamaan dan otoritas hukum kesultanan³⁰. Kompleksitas kota ini dilengkapi dengan pembagian kluster pemukiman berdasarkan spesialisasi pekerjaan atau asal etnis, seperti kampung Kauman untuk para ulama dan santri, Pecinan untuk pedagang Tionghoa, dan Koja untuk para pedagang Muslim dari India Barat³¹.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis mendalam pada bab-bab sebelumnya mengenai transformasi kota dagang (bandar) menjadi Kerajaan Islam (kesultanan) di Nusantara pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, maka ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

Mekanisme Transformasi Institusional: Proses mutasi ruang pesisir dari bandar menjadi kesultanan berjalan melalui dialektika struktural yang diawali oleh konversi agama para elite penguasa pelabuhan (conversion from top). Perubahan status politik ini memicu dekonstruksi konsep legitimasi kekuasaan, di mana konsep sakralitas Dewa-Raja digantikan oleh doktrin teokratis monarki Islam, seperti gelar Sultan, Zilullah fil-Alam, dan Khalifatullah. Proses formalisasi ini disusul dengan pelebagaan syariat ke dalam hukum niaga maritim internasional yang menggantikan tata hukum adat lokal, sehingga menciptakan kepastian hukum universal bagi komunitas dagang transnasional.

Faktor Pemicu Kausalitas Sejarah: Transformasi politis-religius kota-kota dagang Nusantara digerakkan oleh konvergensi dua faktor utama. Secara eksternal, pergeseran geopolitik global akibat disintegrasi kekhalifahan di Timur Tengah mendorong migrasi massal ulama, sufi, dan pedagang Muslim kaya ke koridor sutra maritim Asia Tenggara. Secara internal, para penguasa bandar memanfaatkan Islam sebagai katalisator ekonomi sekaligus instrumen ideologis untuk memutuskan ikatan patronase feodal dan kewajiban upeti terhadap kerajaan pedalaman Hindu-Buddha (seperti Sriwijaya dan Majapahit) yang tengah mengalami senjakala politik.

Implikasi Spasial dan Sosial (Kota Islam Nusantara): Transformasi menjadi kesultanan melahirkan tipologi urban baru yang dikenal sebagai Kota Islam Nusantara. Struktur ruang kota tidak lagi bersifat acak dan pragmatis, melainkan diatur dalam harmoni trilogi simetris yang

²⁹ Denys Lombard, *Le Carrefour Javanais: Essai d'Histoire Globale* (Paris: Éditions de l'ÉHÉSS, 1990), hlm. 142.

³⁰ Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 75.

³¹ Sartono Kartodirdjo, *Menuju Sejarah Kritik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 165.

mengintegrasikan poros spiritual (Masjid Agung), poros politik (Keraton), dan poros ekonomi (Pasar/Pelabuhan) dengan Alun-Alun sebagai pusat aksialnya. Di sisi sosial, terjadi reorganisasi masyarakat urban melalui pembentukan kluster hunian berbasis etnis-profesi (seperti Kauman, Pecinan, dan Koja) yang diikat secara kolektif di bawah yurisdiksi hukum kesultanan.

SARAN

Bagi Penelitian Sejarah Selanjutnya: Diharapkan para sejarawan dan peneliti masa depan dapat memperluas ruang lingkup spasial kajian ini ke wilayah Nusantara bagian timur (seperti poros Maluku-Ternate-Tidore dan Sulawesi-Gowa-Tallo) untuk melihat apakah variasi sosiologis dan komoditas (cengkih dan pala) menghasilkan pola tata ruang dan model institusionalisasi hukum yang berbeda dengan kawasan barat Nusantara.

Bagi Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Bersejarah: Pemerintah daerah dan instansi kebudayaan di kota-kota pesisir kontemporer (seperti Aceh, Melaka, Demak, Banten, dan Cirebon) disarankan untuk merevitalisasi situs-situs bekas bandar dan kesultanan lama. Konsep integrasi trilogi tata ruang kota Islam Nusantara (Keraton-Masjid-Alun-Alun-Pasar) dapat diadopsi kembali sebagai dasar pembangunan tata kota berbasis warisan budaya (heritage-based urban planning) guna menjaga memori kolektif bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1972. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.
- Alfian, Teuku Ibrahim. 1973. *Kronika Pasai: Sebuah Tinjauan Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ambary, Hasan Muarif. 1998. *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologi dan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Arnold, T.W. 1913. *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*. London: Constable & Company.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2004. *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*. Bandung: Mizan.
- De Graaf, H.J. 1986. *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- De Graaf, H.J. dan T.G.Th. Pigeaud. 1984. *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Fang, Liaw Yock. 1976. *Undang-Undang Melaka: The Laws of Melaka*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Guillot, Claude. 1990. *The Sultanate of Banten*. Jakarta: Gramedia Book Publishing Division.
- Hall, Kenneth R. 2011. *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Ibn Battuta. 1994. *The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354*. Vol. 4. Diterjemahkan oleh H.A.R. Gibb. London: The Hakluyt Society.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Menuju Sejarah Kritik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jilid 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, Denys. 1990. *Le Carrefour Javanais: Essai d'Histoire Globale*. Paris: Éditions de l'ÉHÉSS.
- _____. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jilid 2: Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ma Huan. 1970. *Ying-yai Sheng-lan: 'The Overall Survey of the Ocean's Shores' (1433)*. Diterjemahkan oleh J.V.G. Mills. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muljana, Slamet. 1968. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Jakarta: Bhratara.
- Nas, Peter J.M. 2002. *The Indonesian Town Revisited*. Münster: LIT Verlag.
- Pijper, G.F. 1934. *Studien over de Geschiedenis van de Islam in Nederlansch-Indië*. Leiden: E.J. Brill.
- Pires, Tomé. 1944. *The Suma Oriental of Tomé Pires: An Account of the East, from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515*. Jilid 1. London: The Hakluyt Society.
- Reid, Anthony. 2014. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin*. Jilid 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- _____. 2015. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global*. Jilid 2. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi.
- Sutherland, Heather. 1979. *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*. Singapore: Heinemann.

- Tjandrasasmita, Uka. 2000. *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad ke-13 M sampai Abad ke-18 M*. Kudus: Menara Kudus.
- _____. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Van Leur, J.C. 1955. *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*. The Hague: W. van Hoeve.
- Vlekke, Bernard H.M. 1965. *Nusantara: A History of Indonesia*. The Hague: W. van Hoeve.
- Wang Gungwu. 1968. "The First Three Rulers of Malacca." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 41, No. 1, hlm. 11-22.
- Wolters, O.W. 1967. *Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Srivijaya*. Ithaca: Cornell University Press.